

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi

Pada April 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Maluku Tengah sebesar 2,96 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,34. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,68 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,85 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 12,29 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,58 persen.

Pada Mei 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Maluku Tengah sebesar 2,84 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,00. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,46 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,60 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,92 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 11,24 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,93 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kabupaten Maluku Tengah bulan Mei 2025 sebesar 0,63 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 0,68 persen.

Pada Juni 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Maluku Tengah sebesar 2,30 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,00. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,31 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,16 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 6,55 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,00 persen. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kabupaten Maluku Tengah bulan Juni 2025 sebesar 1,89 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,19 persen.

Resiko Ke Depan

1. Harga Pangan Terus Naik

- Kelompok makanan, minuman, dan tembakau selalu naik di tiap bulan.
- Risiko :
 - Cuaca buruk bisa mengganggu panen.
 - Pasokan pangan masih tergantung dari luar daerah.
 - Harga bahan pokok seperti beras, cabai, dan daging bisa melonjak.

2. Kenaikan Harga di Rumah Makan dan Warung

- Inflasi tinggi di kelompok restoran/penyedia makanan.
- Risiko:
 - Harga bahan baku naik.
 - Biaya produksi dan ongkos kirim meningkat.

3. Harga Barang dan Jasa Keperluan Pribadi Naik

- Seperti sabun, kosmetik, jasa perawatan.
- Risiko:

Harga bisa naik saat permintaan meningkat, terutama jelang hari besar.

4. Biaya Kesehatan Mulai Naik

- Kenaikan harga obat dan layanan kesehatan mulai terasa.
- Risiko:
 - Bisa bertambah jika ada penyakit musiman seperti demam berdarah atau ISPA.

5. Kenaikan Harga Bulanan Cukup Tajam

- Inflasi bulanan (month-to-month) di bulan Juni cukup tinggi: 1,89%.
- Risiko:
 - Gejala harga jangka pendek, apalagi kalau pasokan barang terganggu.

6. Pengaruh Cuaca dan Transportasi

- Risiko:
 - Musim kering dan cuaca ekstrem bisa ganggu distribusi barang.
 - Ongkos kirim mahal karena daerah kepulauan.

Saran Antisipasi

- Jaga stok dan pasokan bahan pokok.
- Perkuat peran Bulog dan distribusi pangan lokal.
- Pantau harga secara rutin.
- Lakukan operasi pasar jika harga melonjak.
- Aktifkan TPID untuk respon cepat masalah harga.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah

- Sebagian besar kebutuhan pangan dan barang pokok masih didatangkan dari luar Maluku Tengah.
- Akibatnya, harga mudah naik saat terjadi gangguan distribusi atau kenaikan biaya transportasi.

2. Distribusi Barang Terkendala Akses dan Transportasi

- Kondisi geografis kepulauan dan infrastruktur jalan/logistik yang belum merata menyebabkan distribusi tidak lancar, khususnya ke wilayah terpencil.
- Hal ini menyebabkan disparitas harga antar wilayah dalam satu kabupaten.

3. Belum Optimalnya Cadangan Pangan Daerah

- Belum tersedia sistem cadangan atau buffer stock yang kuat untuk meredam gejolak harga pangan strategis.
- Peran BUMD dan Bulog belum maksimal dalam stabilisasi harga.

4. Keterbatasan Data dan Pemantauan Harga Secara Real-Time

- Pengumpulan dan pelaporan data harga di pasar tradisional masih manual dan lambat.
- Akibatnya, respon pemerintah terhadap kenaikan harga cenderung terlambat.

5. Kurangnya Kegiatan Operasi Pasar Secara Rutin

- Operasi pasar atau subsidi transportasi hanya dilakukan saat krisis, belum menjadi program yang terencana dan rutin.

6. Permintaan Tinggi Saat Hari Besar, Tidak Diimbangi Pasokan

- Setiap menjelang Hari Raya, harga barang naik karena pasokan tidak mencukupi permintaan.
- Koordinasi lintas sektor belum optimal untuk mengantisipasi lonjakan tersebut.

7. Kenaikan Biaya Produksi dan Jasa

▪

Biaya operasional restoran, warung makan, jasa perawatan, dan layanan kesehatan ikut naik, dan berpengaruh terhadap kelompok inflasi jasa

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemantauan Harga dan Stok Secara Berkala

- Dinas terkait bersama BPS dan TPID memantau harga komoditas utama setiap minggu.
- Laporan harga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan intervensi pasar.

2. Operasi Pasar dan Pasar Murah

- Dilakukan pada momen tertentu seperti menjelang Ramadhan, Idul Fitri, dan akhir tahun.
- Komoditas utama seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur dijual dengan harga subsidi.

3. Koordinasi dengan Bulog dan Distributor

- Menjaga ketersediaan bahan pokok di gudang Bulog dan pasar lokal.
- Mencegah penimbunan dan memastikan distribusi berjalan lancar.

4. Gerakan Tanam Cepat Panen

- Dinas Pertanian mendorong rumah tangga dan petani untuk menanam komoditas strategis (cabai, sayur, umbi) di pekarangan atau lahan terbuka.
- Mendukung ketahanan pangan lokal.

5. Subsidi Ongkos Angkut (Transportasi)

- Untuk komoditas pangan dari pusat distribusi ke daerah terpencil.
- Mengurangi disparitas harga antar kecamatan.

6. Peningkatan Kapasitas dan Edukasi Konsumen

- Sosialisasi kepada masyarakat agar bijak dalam belanja dan tidak melakukan panic buying.
- Edukasi tentang diversifikasi pangan dan konsumsi lokal.

7. Pemanfaatan Sistem Informasi Harga

- Mendorong penggunaan teknologi (seperti aplikasi harga pangan atau dashboard harga).
- Menyediakan data real-time untuk pengambilan keputusan oleh TPID.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kerangka Evaluasi

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi dilakukan berdasarkan 4 pilar strategi pengendalian inflasi (4K):

- Keterjangkauan Harga
- Ketersediaan Pasokan
- Kelancaran Distribusi
- Komunikasi Efektif

Evaluasi ini juga mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan 6 langkah konkret pengendalian inflasi dari Kementerian Dalam Negeri.

A. Keterjangkauan Harga

Kelebihan:

- Pemerintah daerah telah melaksanakan operasi pasar murah dan subsidi harga pangan strategis secara berkala.

Kekurangan:

- Skala dan cakupan operasi pasar masih terbatas pada wilayah tertentu.
- Belum ada mekanisme subsidi harga secara langsung kepada kelompok rentan.

B. Ketersediaan Pasokan

Kelebihan:

- Beberapa program ketahanan pangan lokal seperti gerakan menanam cabai dan padi telah digalakkan.

Kekurangan:

- Produksi pangan lokal belum mampu mengimbangi kebutuhan konsumsi.
- Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah masih tinggi.

C. Kelancaran Distribusi

Kelebihan:

- Pemerintah daerah mulai mengidentifikasi jalur distribusi kritis dan melakukan koordinasi dengan pelaku logistik.

Kekurangan:

- Infrastruktur distribusi seperti jalan dan transportasi di wilayah pedalaman masih kurang memadai.
- Belum ada sistem pemantauan real-time distribusi pangan.

D. Komunikasi Efektif

Kelebihan:

- Rilis data inflasi dilakukan secara berkala bersama BPS.

Kekurangan:

- Penyebaran informasi kepada masyarakat masih minim.
- Belum optimal pemanfaatan media sosial dan kanal informasi untuk edukasi inflasi.

3. Evaluasi Terhadap 6 Langkah Konkret Pengendalian Inflasi (Arahan Kemendagri)

Langkah Konkret	Status Implementasi	Catatan
Melaksanakan operasi pasar murah	Sudah berjalan	Perlu diperluas wilayah dan frekuensinya
Menyediakan transportasi pangan	Terbatas	Belum ada alokasi khusus untuk logistik

Menyurat ke produsen agar tidak menaikkan harga	Terbatas	Belum didukung dengan regulasi daerah
Melaksanakan sidak ke pasar/distributor	Sudah dilakukan	Efektivitas pengawasan masih lemah
Gerakan menanam komoditas strategis	Sudah berjalan	Butuh pendampingan dan bibit unggul
Menyampaikan data harga dan stok	Masih manual	Perlu sistem digitalisasi informasi

4. Rekomendasi Perbaikan

1. Digitalisasi Pemantauan Harga dan Stok melalui dashboard TPID berbasis data real-time.
 2. Perluasan Operasi Pasar dan Subsidi Transportasi Pangan, khususnya ke wilayah terpencil.
 3. Peningkatan Kapasitas Produksi Lokal melalui pembinaan petani, koperasi pangan, dan kemitraan BUMDes.
 4. Penguatan Regulasi Daerah terkait pengendalian distribusi dan stabilisasi harga.
 5. Optimalisasi Komunikasi Publik dengan media lokal dan media sosial untuk edukasi dan respons cepat.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penguatan Kelembagaan TPID

- Meningkatkan efektivitas koordinasi antar-OPD dan lintas sektor.
- 2. Peningkatan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan Pangan
 - Mendorong sinergi antara Dinas Pertanian, Perdagangan, Bulog.
 - Penguatan cadangan pangan daerah untuk merespons lonjakan harga.
 - Dukungan distribusi logistik dari sentra produksi ke pasar konsumen.
- 3. Pelaksanaan Operasi Pasar Secara Rutin dan Terencana
 - Menyasar komoditas utama seperti beras, minyak, gula, telur, cabai, dan bawang.
 - Menjangkau wilayah rawan gejolak harga atau sulit akses.
- 4. Pengendalian Biaya Distribusi dan Transportasi
 - Menyediakan subsidi ongkos angkut barang kebutuhan pokok ke wilayah kepulauan atau terpencil.
- 5. Mendorong Produksi Pangan Lokal dan Kemandirian Komunitas
 - Gerakan Tanam Cepat Panen berbasis rumah tangga dan sekolah (cabai, sayuran, umbi).
 - Optimalisasi lahan pekarangan dan lahan tidur.
 - Pemberian stimulan sarana produksi (benih, pupuk, alat sederhana).
- 6. Pemanfaatan Teknologi untuk Pemantauan Harga
 - Pengembangan dashboard harga digital yang terintegrasi.
 - Pemanfaatan aplikasi mobile untuk pelaporan harga oleh petugas pasar dan masyarakat.
 - Sistem peringatan dini inflasi berbasis data.
- 7. Edukasi dan Komunikasi Publik
 - Kampanye belanja bijak, konsumsi pangan lokal, dan antisipasi panic buying.
 - Edukasi tentang inflasi dan dampaknya melalui media sosial, radio lokal, dan forum masyarakat.

Evaluasi dan Pengawasan Kebijakan Secara Berkala

- Monitoring dan evaluasi efektivitas program pengendalian inflasi setiap bulan atau triwulan.
- Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika pasar.